

KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM PADA OPINI WDP DAN WTP
TAHUN 2009-2017



Skripsi Oleh

PAJRIN SANDI KARTOLO

01031181419244

Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM PADA OPINI WDP DAN WTP TAHUN 2009-2017

Disusun oleh :

Nama : Pajrin Sandi Kartolo
NIM : 01031181419244
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

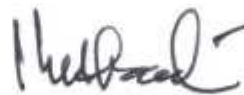
Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal :

22/8/15



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak, CA

195808281988101001

Tanggal :



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA

196508161995121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM PADA OPINI WDP DAN WTP TAHUN 2009-2017**

Disusun oleh:

Nama : Pajrin Sandi Kartolo

NIM : 01031181419244

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 16 Juli 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

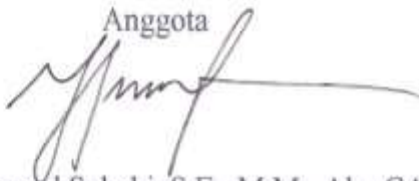
Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 16 Juli 2019

Ketua



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak, CA
NIP. 19580828 198810 1 001

Anggota



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 19650816 199512 1 001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP. 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pajrin Sandi Kartolo

NIM : 01031181419244

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Opini WDP dan WTP Tahun 2009-2017

Pembimbing :

Ketua : Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak, CA.

Anggota 1 : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA

Anggota 2 : Eka Meirawati. S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 16 Juli 2019

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 24 Juli 2019
Pembuat Pernyataan



Pajrin Sandi Kartolo
NIM.01031181419244

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Pajrin Sandi Kartolo

NIM : 01031181419244

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Opini WDP dan WTP Tahun 2009-2017


Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 24 Juli 2019

Pembimbing Skripsi :



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA
NIP. 19580828 198810 1 001



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 19650816 199512 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317 199703 1 002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak penting seberapa lambat anda melaju, selagi anda tidak berhenti.”(Confucius)

*“ Apapun situasinya, kita pasti punya pilihan”
(Pajrin Sandi Kartolo 2019)*

*“Mata harus dibalas mata.”
(Pajrin Sandi Kartolo 2018)*

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- **Bapak dan Ibuku**
- **Saudara - Saudaraku**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat - Sahabatku**
- **Orang - Orang Yang Berjasa
Dalam Hidupku**
- **Dan Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas Nikmat, Karunia, Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Opini WDP dan WTP Tahun 2009-2017**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim pada saat periode opini WDP dan WTP. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun, kendala tersebut dapat diatasi berkat bimbingan, doa, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa dinantikan dengan tangan terbuka. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan bahan masukan akademis bagi peneliti selanjutnya dan berbagai pihak lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun, kendala tersebut dapat diatasi berkat bimbingan, doa, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk ini, dengan tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang masih memberikan Nikmat, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rasulullah SAW yang telah menjadi Suri Tauladan bagi penulis dalam kehidupan di dunia ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama masa studi.
7. Bapak Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak, CA dan Bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis serta memberikan saran dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen serta Karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

10. Ayah, Ibu, dan Adik-adikku yang selalu memberikan doa, memberikan nasihat, dukungan moral maupun materil yang menjadi motivasi utama sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik.
11. Sahabat-sahabat yang pernah satu kosan (Arbi, Edit, Jamil, Eming). Terkhusus Arbi, terima kasih untuk 5 tahun nya ya. Semoga nggak bosan-bosan.
12. Sahabat seperjuangan di akuntansi (Robi, Ginda, Kevin, Bowok, Lutfhi, Wahyu Hafiz, Reno, Kinong, Arif, Dodi, Tio, Jerry, Benan, Hakim, Taufik, Wahyu, Azaria, Jo, Andre, Al, Alif, Weni, Devi, Repi, Riska, Dessy, dan yang lainnya. Dan terima kasih banyak kepada Imam, Riz, Taqin, dan Lam Lam tanpa kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan memberikan berkat-Nya untuk kita semua.



RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Pajrin Sandi Kartolo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 23 Desember 1996

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Jalan Lintas Sumatera Dusun IV Desa Dalam,
Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim

Alamat Email : pajrinsandi@gmail.com

No. Hp : 082380182958

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SDN TALANG PADANG

SMP : SMPN 4 GUNUNG MEGANG

SMA : SMAN 1 UNGGULAN MUARA ENIM

Pendidikan Non Formal : -

Pengalaman Organisasi : Ikatan Mahasiswa Akuntansi

Anggota IMMETA 2015/2016

ABSTRAK

Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Opini WDP dan WTP Tahun 2009-2017

Oleh:

Pajrin Sandi Kartolo;
Drs. H. Burhanuddin, M.Acc, Ak, CA;
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP dan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WTP pada Kabupaten Muara Enim tahun 2009-2017. Penelitian dilakukan pada satu kabupaten yang mengalami peningkatan penerimaan opini dari WDP menjadi WTP. Data penelitian ini adalah laporan anggaran dan realisasi APBD pada Kabupaten Muara Enim tahun 2009-2017. Teknik analisis data menggunakan analisis uji beda (*Paired t Test*). Sementara itu, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio ketergantungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WTP pada Kabupaten Muara Enim.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah, dan Opini Audit.

Ketua



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak, CA
NIP. 19580828 198810 1 001

Anggota



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

**Comparative Financial Performance Of Muara Enim District Government
On WDP and WTP Opinion Period 2009-2017**

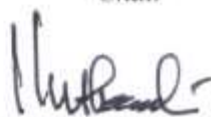
By:

**Pajrin Sandi Kartolo;
Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak, CA;
Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA**

This study aims to examine the difference in local government financial performance WDP opinion period and local government financial performance WTP opinion in Muara Enim Regency period 2009-2017. The study was conducted in one district that experienced an increase in opinion acceptance from WDP to WTP. This research data is the budget report and APBD realization in Muara Enim regency period 2009-2017. The technique of data using analysis of different test (Paired t Test). Meanwhile, the local government's financial performance measure used in this study is degree of fiscal decentralization, ratio of regional independence, PAD effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, and dependency ratio. The results show that the performance of local government finances WDP opinion period have a significant different from the local government's financial performance period of WTP opinion in Muara Enim regency.

Keywords :Financial Performance, Regional Financial Ratio, and Audit Opinion.

Chair



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak, CA
NIP. 19580828 198810 1 001

Member



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA
NIP. 19650816 199512 1 001

Acknowledge,

Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA
NIP. 19730317 199703 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Pengukuran Kinerja	11
2.1.2. Keuangan Daerah.....	14
2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	17
2.1.4. Laporan Keuangan Sektor Publik	22
2.1.5. Audit Sektor Publik.....	26
2.1.6. Opini Audit	29
2.1.7. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	33
2.2. Penelitian Terdahulu	38

2.3. Kerangka Pemikiran	40
2.4. Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	43
3.3. Jenis dan Sumber Data	43
3.4. Metode Pengumpulan Data	44
3.5. Teknik Analisis Data	44
3.5. Rasio Pengukuran	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim	47
4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Muara Enim.....	48
4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Muara Enim.....	48
4.2. Hasil Penelitian	48
4.2.1. Derajat Desentralisasi.....	48
4.2.2. Rasio Kemandirian Daerah.....	50
4.2.3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	52
4.2.4. Analisis Efisiensi Keuangan Daerah.....	54
4.2.5. Rasio Ketergantungan Daerah.....	55
4.3. Perbandingan Kinerja Keuangan	57
4.4. Pengujian Hipotesis	58
4.5. Pembahasan	59

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	62
5.3. Keterbatasan Penelitian	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN	67
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Opini Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2017	5
Tabel 2.1. Perbedaan Audit Sektor Privat dan Sektor Publik di Indonesia.....	27
Tabel 2.2. Tabel Kriteria Derajat Desentralisasi	34
Tabel 2.3. Tabel Kriteria Kemandirian Keuangan	35
Tabel 2.4. Tabel Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	36
Tabel 2.5. Tabel Efisiensi Kinerja Keuangan.....	37
Tabel 2.6. Tabel Kriteria Ketergantungan.....	37
Tabel 2.7. Tabel Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1. Tabel Kriteria Derajat Desentralisasi	49
Tabel 4.2. Tabel Derajat Desentralisasi Kabupaten Muara Enim	49
Tabel 4.3. Tabel Kriteria Kemandirian Keuangan	51
Tabel 4.4. Tabel Kemandirian Kabupaten Muara Enim	51
Tabel 4.5. Tabel Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	52
Tabel 4.6. Tabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim ..	53
Tabel 4.7. Tabel Efisiensi Kinerja Keuangan.....	54
Tabel 4.8. Tabel Efisiensi Keuangan Kabupaten Muara Enim	54
Tabel 4.9. Tabel Kriteria Ketergantungan.....	56
Tabel 4.10. Tabel Ketergantungan Daerah Kabupaten Muara Enim	56
Tabel 4.11. Tabel Rasio Kinerja Keuangan Periode Opini WDP	57
Tabel 4.12. Tabel Rasio Kinerja Keuangan Periode Opini WTP	58
Tabel 4.13. <i>Paired Sample Test</i>	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Gambar Kerangka Pemikiran	40
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel <i>Paired Sample Test</i>	68
Lampiran 1.Surat Riset.....	69
Lampiran 2.Lembar Disposisi.....	70
Lampiran 3. Rekap APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2017	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 yang membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Amandemen yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan terhadap Undang-Undang merupakan reformasi dari perubahan pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah suatu kepala daerah dan penyelenggara yang memimpin semua urusan pelaksanaan yang ada di pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sehubungan dengan diterapkannya daerah otonom tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangannya sendiri demi kepentingan masyarakatnya. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah lebih dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan

masyarakat mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semua itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance* dan *clean goverment*).

Untuk melihat tata kelola yang baik, yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang dilakukannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 menegaskan bahwa pengelolaan itu harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (Mardiasmo 2002, dalam Karlina 2017). Pengelolaan keuangan yang baik, yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap kemajuan daerahnya.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai

kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah selanjutnya akan diperiksa oleh BPK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan daerah dan wajib diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit laporan keuangan.

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Silky, 2012). Untuk menjamin terpenuhinya karakteristik kualitatif tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa temuan audit, opini audit dan rekomendasi.

Semakin banyak temuan audit yang ditemukan dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tersebut kurang baik. Setiap pemerintah daerah tentu mengharapkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Seperti yang disampaikan oleh Wahyu Priyono (2017) bahwa setiap daerah mengharapkan opini tertinggi karena tiga alasan yaitu:

1. *Prestise* adalah kebanggaan karena telah berhasil menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Keuangan Pemerintah (SAP).
2. *Clear and cleas* berarti keuangan telah dinyatakan bersih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
3. Pencitraan yang baik dapat digunakan sebagai modal untuk maju lagi sebagai calon kepala daerah.

Opini audit dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan publik atas pelaporan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Semakin baik opini yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah tersebut dalam penyajian laporan keuangannya (Wendy, 2012). LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat atas pengelolaan keuangan daerah.

Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Heriningsih, 2014). Didapatkannya opini wajar tanpa pengecualian terhadap suatu Kabupaten/Kota, diharapkan kinerja ekonomi, dilihat

dari pertumbuhan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga telah lebih baik daripada Kabupaten/Kota yang belum menerima opini wajar tanpa pengecualian. Pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga juga memerlukan suatu evaluasi (Khairudin, 2013).

Opini BPK terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK RI atas pemeriksaan LKPD. Pencapaian opini WTP menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (Milal, 2013).

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Tabel 1.1. di bawah ini menunjukkan perkembangan opini atas laporan keuangan Kabupaten Muara Enim dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.1 Tabel Opini Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2017

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
WDP	WDP	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: data diolah dari <http://www.bpk.go.id/ihps>

Menurut Auliyana (2017) pada sektor publik di Indonesia terjadi euforia atas perolehan opini WTP yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah. Setiap kepala daerah seakan-

akan terobsesi dan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar WTP di laporan keuangan yang dihasilkan.

Fenomena mengejar opini WTP ini terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, contohnya DPRD Makassar yang mengundang BPK secara langsung guna membahas permasalahan daerah mereka yang menghambat untuk diperolehnya opini WTP sekaligus ajang “lobi” agar BPK memperlunak sikap terkait permasalahan pengelolaan aset di daerahnya (Hasanuddin dalam Auliyana, 2017).

Hasil opini dari BPK adalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena banyak pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP tetapi juga terdapat banyak korupsi atau penyelewengan (Ihwandi, 2016). Senada dengan yang diucapkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat opini BPK atas laporan keuangan belum bisa menjamin bahwa pemerintah daerah bebas korupsi (Priyono, 2017). Sebagai contoh Pemerintah Kota Bogor yang telah mendapat opini WTP, namun juga terdapat indikasi kecurangan yang merugikan negara di dalamnya sehingga tetap diusut dan diproses sebagaimana mestinya (Samad dalam Khairudin, 2013).

Pencapaian opini WTP yang seharusnya menjadi pembuktian bahwa kinerja pemerintah telah baik serta akuntabel. Namun, seolah menjadi ajang pamer prestise bagi pimpinan lembaga pusat dan daerah. Padahal masyarakat memiliki harapan tinggi pada hasil audit. Bisa jadi masyarakat berpikir bahwa laporan keuangan diperiksa berarti jika ada temuan mengakarnya pada tindakan

korupsi sehingga perolehan opini WTP berarti bersih dari korupsi (Auliyana, 2017).

Menurut Abdul Halim dalam Takawalude (2017) salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan adalah dengan menganalisis derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio indeks kemampuan rutin, rasio ketergantungan keuangan daerah.

Pengukuran kinerja sangatlah penting terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Analisis keuangan adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Interpretasi atas hasil perhitungan rasio keuangan bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan antara satu periode dengan periode sebelumnya atau satu daerah dengan daerah yang lain untuk melihat perbedaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mandell, 2006) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Uraian di atas telah mendorong dan mendasari penulis untuk menganalisa **“Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Opini WDP dan WTP Tahun 2009-2017”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan kabupaten Muara Enim pada saat periode opini WDP dan WTP tahun 2009-2017?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Muara Enim pada saat periode opini WDP dan WTP tahun 2009-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah yang diajukan yaitu untuk:

1. Menilai kinerja kabupaten Muara Enim pada saat periode opini WDP dan WTP tahun 2009-2017.
2. Menguji apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Muara Enim pada saat periode opini WDP dan WTP tahun 2009-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Bagi pembaca agar dapat mengetahui bagaimana perbandingan kinerja pemerintah daerah yang beropini WDP dan WTP.
3. Bagi peneliti yang ingin mengkaji di bidang yang sama, diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan landasan pijak penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka penulis akan menguraikannya ke dalam 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan dan evaluasi masalah dalam penelitian ini seperti pengukuran kinerja keuangan daerah, laporan keuangan daerah, dan opini audit.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, jenis dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik penumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan kondisi umum pemerintah daerah kabupaten Muara Enim seperti kondisi geografis, visi dan misi. Serta dijelaskan mengenai analisis dan pembahasan kinerja keuangan daerah kabupaten Muara Enim dan perbedaan kinerja pada saat periode opini WDP dan WTP.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan atas pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Daftar Pustaka

- Artini, I. G., & Sri, L. G. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintahan Kabupaten Tabanan. *Jurnal Universitas Udayana*, Hal 20.
- Auliyana, Emy. 2017. Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP Di Kalangan Pejabat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol.4 No.1 Januari 2017, hlm 22-33.
- Atkinson, Anthony A., Kaplan, Robert S. Matsumura, Ella Mae, dan Young, S. Mark. 2012. *Akuntansi Manajemen*, Edisi Kelima, Jilid 2. Jakarta: Indeks.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPF. Yogyakarta.
- Bisma, I. D., & Susanto, H. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Gane C Swara Edisi Khusus Vol.4 No.3*, Desember 2010, Hal 77-78.
- Dary, Yuni Wulan dan M.Rizal Yahya. (2016). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pendapatan Asli Daerah Periode Opini Non WTP Dan Periode Opini WTP (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.1, No.1 hal: 60-73.
- Gaspersz, Vincent. 2005. *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi Edisi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Heriningsih, Sucahyo. 2014. Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. *University Research Colloquium*, 86-95.
- Ihwandi, Lalu Riza. (2016). Analisis Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan*. Vol.9, No.1. hal 57-69.

- Karlina, Anis dan Nur Handayani. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.6, No.3.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik. Pendekatan Penganggaran Daerah Dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Buku 1. Penerbit: Universitas Diponegoro
- Khairudin. 2013. Does Financial Performance of Local Government Influence on the Audit Agency Opinion?. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4 (1): 33-54.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad dkk. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mandell, Lewis. 2006. Financial Literacy: If It's So Important, Why Isn't It Improving?. Indiana State University.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Budi.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.2, No.1, hal 1-17.
- Margareta, Shinta. 2013. Hubungan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan Pimpinan. *Jurnal UPI*.
- Mega, Pratidina. 2013. Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2008-2010. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Milal, A. Z. 2013. Makna Opini Audit WTP Bagi Kementerian/Lembaga (Studi Kasus pada Kementerian Sosial). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Mirza, Rifka Amalia. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005 Sampai Tahun 2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriyani. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya
- Pangalila, Mario Rainer. 2014. Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota Beropini WDP dan *Disclaimer* Yang Ada di Sulut. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen. Vol.02, No.04.
- Pradika, Rizka Ardhi. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit *Going Concern*. Jurnal Profita.
- Pramono, Joko. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti, Vol.7 No.13.
- Priyono, Wahyu. 2017. Opini BPK dan Substansi Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Keuangan Negara Vol.3 No.07.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardi. 2012. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Administrasi Publik Vol.3 No.2.
- Silky, Raditya Siregar. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Accounting Analysis Journal.
- Takawalude, E.H dkk. (2017). Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Pada Opini Disclaimer Dan WDP. Jurnal EMBA Vol.5, No.2. hal. 1802–1812
- Taufik, Muhammad, Darwanis dan Muhammad Arfan. (2014). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Periode Opini WDP Dan Periode Opini WTP. Jurnal Akuntansi Vol.3, N0.1.
- Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Wendy, Budiarto. 2012. Pengaruh Opini, Temuan Audit, dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010. Jurnal FE-UI.
- Yuwuno, Sony, dkk. 2004. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yuwono, Sony, dkk. 2007. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi*. Edisi 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.